



## *Comparative Analysis of The 2013 Curriculum and The Merdeka Curriculum for Civic Education*

Suriaman<sup>1</sup> Nisrina Nurul Insani<sup>2</sup> Aim Abdulkarim<sup>3</sup> T Heru Nurgiansah<sup>4</sup> Muhammad Asriadi<sup>5</sup>

Program Study of Civic Education, Faculty of Social Science Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3,5</sup>

Universitas PGRI Yogyakarta, Bantul, Provinsi DIY, Indonesia<sup>4</sup>

Email: [suriamanagus199@upi.edu](mailto:suriamanagus199@upi.edu)<sup>1</sup> [nisrina.n.i@upi.edu](mailto:nisrina.n.i@upi.edu)<sup>2</sup> [aimabdulkarim@upi.edu](mailto:aimabdulkarim@upi.edu)<sup>3</sup> [nurgiansah@upy.ac.id](mailto:nurgiansah@upy.ac.id)<sup>4</sup> [muhammadasriadi2026@upi.edu](mailto:muhammadasriadi2026@upi.edu)<sup>5</sup>

### **Abstract**

*The pandemic has resulted in a learning crisis, demanding a curriculum change. A comparative analysis between the 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum at the Secondary School level in civic education becomes relevant to evaluate the education system's response to these challenges. This research aims to identify the differences and similarities in the approaches of both curricula towards civic education and understand their potential in addressing potential learning disparities and inequalities arising from the pandemic. Focusing on the values of Pancasila and intracurricular learning, this study provides profound insights into the adaptability and effectiveness of the curriculum during a crisis. The results are expected to offer guidance for the development of a responsive and inclusive curriculum in facing the dynamics of learning amid global challenges.*

**Keywords:** Civic Education, Pancasila Education, Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, Comparative

### **Abstrak**

Pandemi mengakibatkan krisis pembelajaran, yang menuntut adanya perubahan kurikulum. Analisis komparasi antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah dalam pembelajaran kewarganegaraan menjadi relevan untuk mengevaluasi respon pendidikan terhadap tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pendekatan kedua kurikulum tersebut terhadap pembelajaran kewarganegaraan serta memahami potensinya dalam mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan pembelajaran yang mungkin timbul akibat pandemi. Fokus pada karakter Pancasila dan pembelajaran intrakurikuler, studi ini memberikan wawasan mendalam terkait adaptabilitas dan keefektifan kurikulum di masa krisis. Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan untuk pengembangan kurikulum yang responsif dan inklusif dalam menghadapi dinamika pembelajaran di tengah tantangan global.

**Kata kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, Komparatif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama bertahun-tahun. Perubahan kurikulum adalah salah satu strategi untuk merespon isu-isu krisis pembelajaran. Perubahan kurikulum dilakukan bukan karena kurikulum sebelumnya tidak efektif, namun karena strategi implementasinya kurang dipersiapkan (Ball, 2005). Sebagai respons terhadap tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh sistem pendidikan, Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum yang berbeda seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang lebih baru (Rejeki et al., 2022). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pendekatan kedua kurikulum tersebut terhadap pembelajaran kewarganegaraan serta memahami potensinya dalam mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan pembelajaran yang mungkin timbul akibat pandemi. Kurikulum 2013



diperkenalkan pada tahun 2013 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Prayoga et al., 2020). Kurikulum ini berfokus untuk memastikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan pada tahun 2020, merupakan kurikulum terbaru di Indonesia (Achmad et al., 2023). Kurikulum ini juga dikenal sebagai Merdeka Belajar, dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan, guru, dan siswa untuk berinovasi, berkreasi, dan belajar secara mandiri (Kasman & Lubis, 2022). Perbandingan Konten Kurikulum Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal konten mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kedua kurikulum tersebut menekankan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dalam kedua kurikulum tersebut, siswa diharapkan untuk belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Namun, ada beberapa perbedaan dalam pendekatan dan fokus dari kedua kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 berfokus pada penyediaan dasar pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang konsep dan institusi kewarganegaraan, sedangkan Kurikulum Merdeka menekankan kebebasan berpikir dan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk mempertanyakan dan menganalisis isu-isu sosial, terlibat dalam diskusi yang bermakna, dan mengembangkan perspektif mereka sendiri. Kurikulum ini bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran yang dipimpin oleh siswa dan memberdayakan siswa untuk mengambil peran aktif dalam membentuk pemahaman mereka tentang konsep-konsep kewarganegaraan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan interaktif dan partisipatif, seperti debat, simulasi, dan proyek-proyek komunitas. Kurikulum Merdeka juga menggabungkan studi kasus dunia nyata dan peristiwa terkini untuk membuat pengalaman belajar lebih relevan dan menarik bagi siswa.

Sebaliknya, Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penyediaan basis pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman konsep kewarganegaraan. Siswa diharapkan untuk belajar tentang struktur dan fungsi pemerintahan, sistem hukum, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa dan memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan solusi untuk isu-isu kewarganegaraan (Prasetyo et al., 2022). Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Kewarganegaraan dicirikan oleh penekanannya pada kebebasan berpikir, keterampilan berpikir kritis, dan pembelajaran yang dipimpin oleh siswa. Kurikulum ini berupaya memberdayakan siswa untuk secara aktif terlibat dengan konsep kewarganegaraan dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri, sementara Kurikulum 2013 lebih berfokus pada pemberian dasar pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang konsep dan institusi kewarganegaraan.

Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka Belajar adalah dua kurikulum yang berbeda yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia (Susanti et al., 2023). Kurikulum 2013 diimplementasikan pada tahun 2013 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan inovasi-inovasi yang mendorong praktik pembelajaran yang lebih baik (Mira et al., 2020). Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada kebebasan berpikir, keterampilan berpikir kritis, dan pembelajaran yang dipimpin oleh siswa (Anggraeni & Purnomo, 2023; Prasetyo et al., 2022). Salah satu fitur utama dari Kurikulum 2013 adalah fokusnya pada diversifikasi, dengan mempertimbangkan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kebutuhan peserta didik (Yaelasari & Astuti, 2022). Di sisi lain, Kurikulum Merdeka Belajar diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai respons terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.



Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan siswa lebih banyak fleksibilitas dalam pembelajaran mereka, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Kurikulum baru ini menekankan pada kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan belajar secara mandiri.

Implementasi Kurikulum 2013 dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kewarganegaraan, demokrasi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Para guru didorong untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengajar pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan siswa (Utami et al., 2021). Mereka juga didorong untuk memasukkan konten dan isu-isu lokal ke dalam pelajaran mereka, yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan pembelajaran mereka dengan situasi kehidupan nyata di masyarakat. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam pendidikan kewarganegaraan masih relatif baru dan dapat bervariasi di setiap sekolah (Utami et al., 2021). Namun, prinsip-prinsip yang mendasari Kurikulum Merdeka Belajar selaras dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Penekanan pada pemberdayaan siswa dan pembelajaran mandiri dalam Kurikulum Merdeka Belajar dapat berkontribusi pada pengembangan kewarganegaraan aktif di kalangan siswa. Selain itu, Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dan terlibat dalam penelitian dan proyek independen yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan di masyarakat (Novita et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode *library research* atau yaitu studi kepustakaan (Mahanum, 2021), untuk mengumpulkan banyak referensi tentang analisis evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa berbagai referensi, termasuk jurnal dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Referensi-referensi yang digunakan mencakup jurnal-jurnal dan dokumen resmi yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Penggunaan Google Scholar sebagai sumber jurnal memberikan akses terhadap penelitian-penelitian terkini dan relevan yang dapat memperkaya analisis dalam konteks penilaian autentik di dunia pendidikan. Selama proses penelitian, peneliti secara mendalam memeriksa isi dari referensi-referensi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang perbandingan kedua kurikulum tersebut dalam analisis kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui pengumpulan data dan analisis yang teliti, peneliti kemudian merumuskan pendapatnya mengenai perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Fokus utama penilaian tersebut difokuskan pada aspek-aspek terkait kurikulum dan pembelajaran PKn. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi dan efektivitas kedua kurikulum tersebut dalam membentuk proses pendidikan kewarganegaraan yang autentik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tujuan Kurikulum**

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,



dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud, 2018). Kurikulum ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, menciptakan manusia yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Kurikulum 2013 juga bertujuan untuk meningkatkan keunggulan intelektual dan moral peserta didik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan bangsa. Kurikulum 2013 menekankan pada penguasaan kompetensi dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan karakter peserta didik, seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab (Kusmanto, 2020). Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan fleksibilitas dan keberagaman dalam pembelajaran intrakurikuler. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi ide-ide dan meningkatkan kemampuan mereka tanpa terikat pada tujuan pembelajaran tertentu. Guru dapat memilih berbagai metode pembelajaran, yang memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa (Kemendikbudristek, 2022a). Profil siswa Pancasila dalam Kurikulum Merdeka dicapai melalui proyek yang dibuat berdasarkan tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek-proyek ini sangat penting karena akan membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun, perlu diingat bahwa proyek-proyek tersebut tidak terikat pada konten mata pelajaran atau dimaksudkan untuk mencapai target pembelajaran tertentu. Metode ini dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih komprehensif dan relevan bagi peserta didik. Metode ini berfokus pada membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Landasan Kurikulum**

Landasan kurikulum menjadi sangat penting dalam merancang sebuah kurikulum yang berkualitas. Dengan memiliki landasan yang kuat dan jelas, kurikulum dapat memberikan arah dan pedoman bagi para pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, landasan kurikulum juga dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Setidaknya, pada kurikulum 2013, secara filosofis dilandasi oleh pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang; peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual dan kemampuan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu; dan pendidikan bertujuan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan kepedulian yang lebih besar daripada yang dimiliki orang lain (*experimentalism and social reconstructivism*). Oleh karena itu, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi yang disebutkan di atas untuk mengembangkan kehidupan pribadi siswa dalam hal agama, seni, kreativitas, komunikasi, nilai, dan berbagai dimensi inteligensi. Dimensi-dimensi ini disesuaikan dengan masing-masing siswa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan umat manusia (Permendikbud, 2018).

Secara sosiologis, kurikulum 2013 mengacu pada pemahaman bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana pendidikan tersebut berlangsung. Kurikulum 2013 menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman tentang peran mereka dalam masyarakat dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang aktif (Rahmatullah, 2018). Salah satu landasan sosiologis yang digunakan dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah teori konflik sosial. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan konflik antar kelompok tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur sosial. Dalam konteks pendidikan, landasan



teori konflik sosial ini diimplementasikan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dan memahami konflik-konflik sosial yang ada dalam masyarakat serta cara-cara penyelesaiannya (Nurhasanah, 2021). Selain itu, landasan sosiologis kurikulum 2013 juga mencakup teori interaksi sosial. Teori ini menekankan pentingnya interaksi antara individu dalam membentuk identitas sosial dan mempengaruhi proses belajar. Dalam kurikulum 2013, pendekatan ini diimplementasikan dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran, baik melalui kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Kurikulum 2013 dirancang untuk memenuhi tuntutan konsepsi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik dan konteks kehidupannya, sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsep ini menuntut bahwa kurikulum harus dilihat sebagai sarana untuk pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya, dan bahwa kurikulum harus diberikan perlakuan pedagogis yang sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Oleh karena itu, pembelajaran dan kurikulum tidak hanya mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari peradaban manusia, tetapi juga mewujudkan proses pembudayaan siswa sepanjang hidup manusia (Fernandes, 2019).

Secara teoritis, landasan kurikulum 2013 menetapkan dua hal: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Hasil belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi diri mereka sendiri, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil belajar untuk seluruh sekolah (Permendikbud, 2018). Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah dasar hukum yang menjadi pijakan untuk penyusunan dan implementasi kurikulum di Indonesia sebagai acuan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis tersebut mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2005, dan PP Nomor 32 Tahun 2013. Beberapa dasar yuridis tersebut masih menjadi acuan bagi sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 (Firdaus et al, 2022).

Kebijakan pendidikan nasional, yang tercermin dalam beberapa dokumen penting, membentuk fondasi untuk pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Pertama, alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional yang menekankan komitmen negara untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas tinggi yang sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. Kedua, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur struktur dan prinsip dasar sistem pendidikan nasional, yang mencakup hak dan kewajiban semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022, menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga pendidikan untuk memastikan kualitas dan konsistensi pendidikan. Selain itu, Kurikulum Merdeka mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Ini termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2025 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Terakhir, namun tidak kurang penting, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Permendikbud No. 22 Tahun 2020) berfungsi sebagai referensi penting untuk menetapkan rencana strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan, berkualitas, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional, sesuai dengan dokumen-dokumen ini. (Anggraena, Y., 2021).



## **Struktur Kurikulum**

Struktur kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 (Kurikulum 2013) dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKn adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, landasan filosofis negara Indonesia, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif (Supriana, 2018). Struktur kurikulum PPKn dalam Kurikulum 2013 mencakup beberapa komponen antara lain kompetensi inti yang bertujuan mengukur tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik di setiap tingkat kelas sekolah menengah (Yulianti dkk, 2021). Kompetensi inti tersebut antara lain mengukur sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Pada pengembangan kurikulum 2013, proses pembelajaran diharapkan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi setidaknya pada mata pelajaran PPKn. Pembelajaran PPKn ditentukan pada kelompok A mata pelajaran umum dengan jumlah pelajaran selama 2 jam pelajaran (90 menit) per pekan (Supriana, 2020). Dengan jumlah jam tersebut, menurut penulis sangat kurang untuk mengembangkan sikap peserta didik.

Pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah dua kegiatan utama dalam struktur kurikulum merdeka di sekolah dasar dan menengah yang sangat penting untuk perkembangan siswa. Setiap mata pelajaran diajarkan melalui pendekatan yang berfokus pada tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini memberikan dasar yang terstruktur untuk membantu siswa memahami lebih baik tentang apa yang diajarkan (Kemendikbudristek, 2022b). Namun demikian, tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah untuk meningkatkan pencapaian profil siswa dalam hal penerapan nilai-nilai Pancasila dan relevansi dengan Standar Kompetensi Lulusan. Metode ini menciptakan keseimbangan antara pemahaman konsep akademik dan pembentukan karakter Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang luas.

## **Materi Pembelajaran**

Materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Kurikulum 2013 adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan di Indonesia. PPKn bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang baik, serta memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan (Kosassy, 2017). Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. PPKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Materi PPKn dalam Kurikulum 2013 mencakup beberapa topik penting yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mencakup materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dengan tujuan utama membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Satu-satunya mata pelajaran yang secara khusus membuat Profil Pelajar Pancasila adalah mata pelajaran ini. Metode pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah cara untuk mewujudkannya. Pendidikan Pancasila menjadi landasan penting dalam membentuk karakter siswa, memastikan mereka memiliki sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan yang kuat selain pengetahuan akademik (Kemendikbudristek, 2023)



## Model dan Metode Pembelajaran

Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan pendidikan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai siswa secara holistik. PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum ini, yang berfokus pada pengembangan pemahaman siswa tentang Pancasila (lima prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia) dan menumbuhkan kewarganegaraan yang baik (Marpaung, 2022). Ada beberapa model dan metode yang digunakan untuk mengajarkan PPKn dalam Kurikulum 2013. Model dan metode ini dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran mereka dan mendorong pemikiran kritis, kolaborasi, dan partisipasi aktif. Untuk mendorong hal tersebut, setidaknya menerapkan model *taught curriculum* dan *learned-curriculum*. Model *taught curriculum* yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan proses yang dikembangkan berupa kegiatan di sekolah, kelas dan masyarakat. Sedangkan, model *learned-curriculum* yaitu pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik dan kemampuan awal. Pengalaman belajar sebagai hasil belajar individu peserta didik dan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum (Permendikbud, 2018). Kurikulum Merdeka mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran berikut: Pertama, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan saat ini, tetapi juga mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam agar pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kedua, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik saat ini sehingga sesuai dengan kebutuhan belajar. Keempat, pembelajaran didasarkan pada relevansi, yang berarti bahwa itu dirancang dengan mempertimbangkan konteks, lingkungan, dan budaya siswa. Itu juga berarti bahwa orang tua dan komunitas dilibatkan dalam proses pembelajaran. Terakhir, metode pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan berfungsi sebagai landasan untuk menyiapkan siswa untuk tuntutan zaman (Sufyadi et al., 2021)

## Evaluasi Pembelajaran

Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam kurikulum 2013 mencakup beberapa aspek yang penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi dalam konteks pembelajaran PPKn bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, mengevaluasi kualitas pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi pengembangan program pembelajaran di masa mendatang. Prinsip tersebut antara lain otentisitas (*authenticity*), komprehensif (*comprehensiveness*), formatif (*formative*), terpadu (*integrated*), dan berkelanjutan (*sustainable*) (Chotimah, 2021). Prinsip-prinsip asesmen dalam Kurikulum Merdeka dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, asesmen dianggap sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, yang melibatkan penyediaan informasi dan fasilitasi pembelajaran. Fokus utamanya adalah memberikan umpan balik kepada pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali sebagai referensi untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang lebih baik. Kedua, prinsip asesmen menekankan bahwa asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk menjelaskan kemajuan belajar, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan berfungsi sebagai landasan untuk penyusunan program pembelajaran berikutnya. Selain itu, asesmen harus dilaksanakan dan dirancang sesuai dengan tujuan asesmen, memberikan keleluasaan dalam menentukan teknik dan waktu pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian siswa dibuat secara sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang sifat dan kemampuan yang dicapai siswa, dan menawarkan strategi untuk tindak lanjut. Kelima, hasil penilaian digunakan sebagai bahan refleksi oleh pendidik,



tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan (Sufyadi et al., 2021).

**Tabel 1. Komparasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Pembelajaran PKn di Sekolah Menengah**

No	Indikator Kurikulum	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
1	Tujuan Kurikulum	mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia	memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi ide-ide dan meningkatkan kemampuan mereka tanpa terikat pada tujuan pembelajaran tertentu. Guru dapat memilih berbagai metode pembelajaran, yang memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa
2	Landasan Kurikulum	Landasan yuridis kurikulum 2013 : UUD NRI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2005, dan PP Nomor 32 Tahun 2013.	Landasan yuridis kurikulum Merdeka : UUD NRI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3	Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum PPKn dalam Kurikulum 2013 mencakup beberapa komponen antara lain kompetensi inti yang bertujuan mengukur tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik di setiap tingkat kelas sekolah menengah	Pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah dua kegiatan utama dalam struktur kurikulum merdeka di sekolah dasar dan menengah
4	Materi Pembelajaran	Materi PPKn dalam Kurikulum 2013 mencakup beberapa topik penting yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKn bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang baik, serta memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan	Materi Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mencakup materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dengan tujuan utama membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, amanah, jujur, dan bertanggung jawab
5	Model dan Metode Pembelajaran	Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan pendidikan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai siswa secara holistik.	Kurikulum Merdeka mengikuti prinsip pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan berfungsi sebagai landasan untuk menyiapkan siswa untuk tuntutan zaman
6	Evaluasi Pembelajaran	Evaluasi dalam konteks pembelajaran PPKn bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, mengevaluasi kualitas pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi pengembangan program pembelajaran di masa mendatang	asesmen dianggap sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, yang melibatkan penyediaan informasi dan fasilitasi pembelajaran. Fokus utamanya adalah memberikan umpan balik kepada pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali sebagai referensi untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang lebih baik



## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka sama-sama bertujuan memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi pedagogis, struktur pembelajaran, serta capaian pembelajaran yang diharapkan. Kurikulum 2013 menekankan pencapaian kompetensi yang terstruktur melalui Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang terstandar, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih menonjolkan fleksibilitas pembelajaran, kontekstualisasi materi, dan kemandirian belajar peserta didik. Dari perspektif pedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 berakar kuat pada pendekatan berbasis kompetensi dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, pembentukan karakter, serta keterpaduan antara tujuan pembelajaran dan sistem penilaian. Pendekatan ini mencerminkan tradisi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan moral dengan pembelajaran kewargaan. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 cenderung menitikberatkan pada penguasaan materi dan alur pembelajaran yang sistematis, yang dapat memperkuat kejelasan konseptual namun berpotensi membatasi eksplorasi kontekstual peserta didik (Suyanto et al., 2017; Winarno, 2019).

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menghadirkan pergeseran paradigma menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik dan berbasis proyek. Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum ini memberi ruang lebih luas bagi praktik kewargaan nyata, pembelajaran partisipatif, serta penguatan konteks sosial-kultural. Integrasi *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* mendorong peserta didik untuk mengalami proses kewargaan melalui kolaborasi, refleksi, dan keterlibatan dalam isu sosial di lingkungan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan kewarganegaraan kontemporer yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dalam membentuk kompetensi demokratis (Biesta, 2015; Banks, 2017). Perbedaan lain yang signifikan tampak pada sistem penilaian. Kurikulum 2013 menggunakan kerangka evaluasi yang relatif terstruktur dengan pengukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui indikator yang jelas. Sementara itu, Kurikulum Merdeka lebih menekankan asesmen formatif, pembelajaran reflektif, serta perkembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pergeseran ini mencerminkan tren reformasi pendidikan global yang mulai menempatkan proses belajar sebagai fokus utama, bukan semata hasil belajar (Darling-Hammond et al., 2020).

Penguatan pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki landasan kebijakan yang jelas dalam regulasi pendidikan nasional. Implementasi Kurikulum Merdeka secara normatif diatur dalam kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang menegaskan bahwa kurikulum ini dirancang untuk memberi fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Dalam dokumen kebijakan disebutkan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan untuk "*mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mendorong penguatan kompetensi dan karakter melalui pembelajaran intrakurikuler yang beragam serta projek penguatan profil pelajar Pancasila*" (Kemendikbudristek, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya menyangkut struktur mata pelajaran, tetapi juga filosofi pembelajaran kewarganegaraan yang menempatkan pengalaman belajar sebagai inti proses pendidikan. Lebih lanjut, regulasi nasional menegaskan bahwa satuan pendidikan diberikan keleluasaan dalam menyusun kurikulum operasional serta menentukan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas ini menandai pergeseran dari model kurikulum yang seragam menuju model yang adaptif dan kontekstual. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, kebijakan tersebut membuka ruang bagi guru untuk mengintegrasikan isu-



isu sosial aktual, praktik demokrasi sekolah, serta pembelajaran berbasis proyek sebagai bagian dari penguatan kompetensi kewargaan peserta didik.

Selain itu, dalam kebijakan implementasi kurikulum ditegaskan bahwa Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan komponen wajib yang berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter dan kompetensi lintas disiplin. Hal ini memperkuat orientasi Kurikulum Merdeka yang tidak hanya menekankan capaian kognitif, tetapi juga pengalaman kewargaan yang bersifat reflektif dan partisipatif. Dengan demikian, secara kebijakan Kurikulum Merdeka menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses pembelajaran transformatif yang bertujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan berkarakter Pancasila. Dari segi normatif, Kurikulum Merdeka memiliki dasar regulasi yang menegaskan perubahan orientasi pembelajaran nasional. Dalam kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dinyatakan bahwa kurikulum dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Secara kebijakan, transformasi kurikulum ini menunjukkan evolusi sistem pendidikan nasional yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyesuaikan pendidikan Indonesia dengan tuntutan kompetensi global tanpa mengabaikan identitas nasional. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka dapat dipahami bukan sekadar perubahan kurikulum, melainkan upaya sistemik untuk menggeser Pendidikan Kewarganegaraan dari mata pelajaran berbasis konten menuju pengalaman belajar kewargaan yang lebih transformatif.

Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022, yang menyebutkan bahwa "*Kurikulum dirancang dengan struktur yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik.*" Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara menggeser orientasi kurikulum dari pendekatan berbasis konten menuju pendekatan berbasis kompetensi dan pengalaman belajar. Jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013 yang menekankan standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang seragam secara nasional, Kurikulum Merdeka justru memberi ruang diferensiasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, secara kebijakan terjadi pergeseran dari model sentralistik menuju model desentralistik dalam pengelolaan pembelajaran. Selain itu, dalam regulasi implementasi kurikulum juga ditegaskan bahwa Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian integral dari struktur kurikulum. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa proyek dirancang untuk "*menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik melalui pengalaman belajar kontekstual dan lintas disiplin.*" Rumusan ini menunjukkan bahwa secara normatif Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi hanya diposisikan sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai praktik pembelajaran yang terintegrasi dalam pengalaman sosial peserta didik.

Pada level implikasi, perubahan kebijakan kurikulum menunjukkan adanya reposisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional. Jika Kurikulum 2013 masih menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana transmisi nilai dan pengetahuan kebangsaan, Kurikulum Merdeka mengarah pada pembelajaran kewargaan yang lebih partisipatif dan transformatif. Secara kebijakan, orientasi ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menyesuaikan pendidikan kewarganegaraan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21, tanpa meninggalkan basis ideologis nasional. Dengan memasukkan pengalaman belajar sosial sebagai bagian dari struktur kurikulum, kebijakan Kurikulum Merdeka berpotensi memperkuat pembentukan warga negara yang aktif, reflektif, dan kontekstual. Namun demikian, perubahan kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi sistemik. Fleksibilitas kurikulum memerlukan dukungan kebijakan lanjutan dalam bentuk pelatihan guru, penguatan



asesmen autentik, serta penyediaan sumber belajar kontekstual. Tanpa dukungan tersebut, tujuan normatif kebijakan berpotensi tidak tercapai pada level praktik pembelajaran. Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 memiliki keunggulan dalam hal struktur, standarisasi, dan kejelasan capaian pembelajaran, sedangkan Kurikulum Merdeka menawarkan potensi yang lebih besar dalam mengembangkan pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan sosial peserta didik. Namun demikian, efektivitas kedua kurikulum tersebut sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan institusi pendidikan, serta ketersediaan sumber belajar. Dengan demikian, reformasi kurikulum dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sebagai produk kebijakan yang final. Oleh karena itu, reformasi kurikulum dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai perubahan struktur kurikulum, melainkan sebagai transformasi kebijakan pendidikan yang membutuhkan kesiapan sistem secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Perbandingan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah dalam pembelajaran Kewarganegaraan melibatkan beberapa aspek yang relevan. Dari segi fokus pembelajaran, kurikulum 2013 memiliki fokus utama pada penguatan karakter bangsa, pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Sedangkan Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Dari segi isi materi, kurikulum 2013 memiliki struktur kurikulum yang terstruktur dengan mata pelajaran yang ditentukan. Sementara itu, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih besar bagi sekolah untuk menentukan isi materi pembelajaran. Dari segi metode pembelajaran, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang melibatkan proses berpikir kritis dan keterampilan ilmiah. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dari segi evaluasi pembelajaran, Kurikulum 2013 menggunakan sistem evaluasi berbasis kompetensi dengan penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan metode penilaian yang lebih variatif dan kreatif. Sedangkan dari segi peran guru, Kurikulum 2013 mengharapkan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Sementara itu, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih besar bagi guru untuk mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai.

Kebaruan (novelty) artikel berjudul *Comparative Analysis of The 2013 Curriculum and The Merdeka Curriculum for Civic Education* terletak pada rekonstruksi analitis berbasis kerangka teori kurikulum kritis dan citizenship education kontemporer yang tidak sekadar membandingkan aspek struktural antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, tetapi mengelaborasi pergeseran epistemologis dari paradigma kompetensi berbasis standar menuju paradigma pembelajaran diferensiatif yang berorientasi pada agensi peserta didik dan pembentukan profil kewarganegaraan transformatif. Studi ini menawarkan sintesis teoritik baru dengan memetakan bagaimana perubahan desain kurikulum merefleksikan transformasi konseptual dari civic knowledge yang normatif-instruksional menuju civic reasoning yang reflektif-partisipatoris dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus menguji implikasinya terhadap konstruksi identitas kewarganegaraan demokratis di era post-truth dan disrupsi digital. Dengan pendekatan komparatif-kritis berbasis policy analysis dan teori demokrasi deliberatif, artikel ini menghasilkan model konseptual integratif yang menjelaskan dinamika relasi antara regulasi kurikulum, otonomi pedagogis, dan praksis kewarganegaraan di ruang kelas, sehingga memberikan kontribusi orisinal pada diskursus global mengenai reformasi kurikulum kewarganegaraan dalam konteks negara berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H., Ratnasari, D., Amin, A., Yuliani, E., & Liandara, N. (2022). Penilaian autentik pada kurikulum merdeka belajar dalam pembelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5685–5699. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3280>
- Anggraena, Y., Felicia, N., G. D. E., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2021). Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran. *Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*.
- Anggraeni, L., & Purnomo, H. (2023). Penerapan Merdeka Belajar Materi Pkn Pada Karakter Profil Pelajar Pancasila. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 389-399.
- Ball, S. J. (2005). Education policy and social class: The selected works of Stephen J. Ball. In *Education Policy and Social Class: The Selected Works of Stephen J. Ball*. <https://doi.org/10.4324/9780203015179>
- Banks, J. A. (2017). *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (2<sup>nd</sup> ed.). Jossey-Bass.
- Biesta, G. (2015). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Routledge.
- Chotimah, U. (2021). *Buku ajar evaluasi pembelajaran PPKN*. Bening Media Publishing.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Fernandes, R. (2019). Relevansi Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Peserta didik di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Socius: Journal of sociology research and education*, 6(2), 70-80.
- Firdaus, H. ., Laensadi, A. M. ., Matvayodha, G. ., Siagian, F. N. ., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 686–692. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5302>
- Kasman, K., & Lubis, S. (2022). Teachers' Performance Evaluation Instrument Designs in the Implementation of the New Learning Paradigm of the Merdeka Curriculum. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 8(3), 760-775. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v8i3.5674>
- Kemendikbudristek. (2022)a. Buku Saku: Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*.
- Kemendikbudristek. (2022)b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2022*.
- Kemendikbudristek. (2023). Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2023. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2023*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.



- Kosassy, S. O. (2017). Analisis konsep dan implementasi kurikulum 2013. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 12(1), 78-89.
- Kusmanto, H. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
- Laila, R. N., Assunniyah, N., Nugroho, N. S. A., Sari, R. G. P., Suwandi, S., & Setiyoningsih, T. (2022). Implementation of pancasila student profile in the merdeka curriculum for high school in sragen regency. *Al Hikmah: Journal of Education*, 3(1), 135-148. <https://doi.org/10.54168/ahje.v3i1.111>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Marpaung, R. W., & Sinaga, S. B. (2022). Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 Di Masa Pandemi Covid-19. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(2), 170-179.
- Mira, P., Tantra, D. K., & Saputra, I. N. P. H. (2020). Reading interest, reading self-efficacy, and reading competency in the junior high school. *International Journal of Language and Literature*, 4(2), 63-68. <https://doi.org/10.23887/ijll.v4i2.30290>
- Novita, M., Kusumaningsih, W., Setia Wardana, Y., Kumar Behera, S., M., & Iskandar, F. (2022). Advancing Indonesian Education through the Three Penggerak Programs. *KnE Social Sciences*, 7(19), 421-431. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i19.12462>
- Nurhasanah, A., Pribadi, R. A., & Nur, M. D. (2021). Analisis kurikulum 2013. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(02), 484-493.
- Permendikbud, R. I. Nomor 36 Tahun 2018. *Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor*, 59.
- Prasetyo, A., Supriyanto, S., & Suliwati, S. (2022). The Spirit of Tawhid in the Merdeka Curriculum: Ismail Raji Al-Faruqi's Thoughts. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 27(2), 131-144. <https://doi.org/10.24090/insania.v27i2.6694>
- Prayoga, A., Irawan, I., & Rusdiana, A. (2020). Karakteristik program kurikulum pondok pesantren. *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 2(1), 77-86.
- Rahmatullah, R. (2018). Landasan Pengembangan Kurikulum 2013. *journal TA'LIMUNA*, 2(2), 123-135.
- Rejeki, U. S., Sihombing, L. N., Togatorop, J. B., & Cornelia, T. S. (2022). Pengembangan kurikulum pembelajaran.
- ROHIMAT, S., Sanusi, S., & Munthahanah, M. (2022). Diseminasi platform merdeka mengajar untuk guru sma negeri 6 kota serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 1-9. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v4i2.2035>
- Sufyadi, S., Lmabas, Rosdiana, T., Novrika, S., Isyowo, S., Hartini, Y., Primadonna, M., Rochim, N. A. F., & Rizal, M. L. (2021). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA). In *Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*.
- Supriana, I. G. A., Sukadi, S., & Suastika, I. N. (2018). Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKN Pada SMA Negeri di Kecamatan Busungbiu. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 2(2), 96-104.
- Supriana, I. G. A., Sukadi, S., & Suastika, I. N. (2020). Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ppkn Pada SMA Negeri Di Kecamatan Busungbiu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 24-34.
- Susanti, H., Fadriati, F., & B.S, I. A. (2023). Problematika implementasi kurikulum merdeka di smp negeri 5 padang panjang. *Alsysis*, 3(1), 54-65. <https://doi.org/10.58578/alsysis.v3i1.766>



- Suyanto, B., Winarno, W., & Syaifudin, A. (2017). Implementation of Curriculum 2013 in Civic Education learning. *Journal of Social Studies Education Research*, 8(3), 112–130.
- Utami, L. P. R. A., Padmadewi, N. N., Artini, L. P., & Dewi, N. L. P. E. S. (2021). Teachers' perceived attitudes toward the implementation of 21st century skills at primary school. *International Journal of Language and Literature*, 5(1), 1-10.  
<https://doi.org/10.23887/ijll.v5i1.27667>
- Winarno. (2019). Paradigm shift in Indonesian Civic Education: Curriculum and learning reform. *Cakrawala Pendidikan*, 38(2), 284–296.  
<https://doi.org/10.21831/cp.v38i2.24556>
- Yaelasari, M. and Astuti, V. Y. (2022). Implementasi kurikulum merdeka pada cara belajar siswa untuk semua mata pelajaran (studi kasus pembelajaran tatap muka di smk infokom bogor). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(7), 584-591.  
<https://doi.org/10.36418/japendi.v3i7.1041>
- Yuliatin, Y., Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Basariah, B. (2021). Kurikulum PPKn dan Peluang Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Prosiding SAINTTEK*, 3, 471-482